

# Partai Politik dan Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

**Ella S. Prihatini, Ph.D.**

Diskusi Daring Bersama *The Indonesian Institute*

Kamis, 28 November 2024

# Agenda

- Keterwakilan perempuan di parlemen:** Perspektif global
- Meningkatkan keterwakilan perempuan:** Manfaat bagi partai politik
- Strategi pemerintah:** Evaluasi penerapan di berbagai negara
- Dinamika internal partai politik:** Beberapa praktik teladan

# Keterwakilan perempuan di parlemen: Perspektif global

Secara global, representasi perempuan di parlemen mencapai **27 persen** dan kesetaraan diperkirakan baru akan tercapai **39 tahun lagi**.

Di tingkat lokal, keterwakilan perempuan adalah **35,5 persen** anggota terpilih.

*Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen nasional merupakan **tolok ukur umum** yang digunakan untuk menilai kemajuan nasional menuju **kesetaraan gender** dalam kehidupan publik serta pemberdayaan politik perempuan.*

# Keterwakilan perempuan di parlemen: Perspektif global

<b>Negara</b>	<b>Pemilu</b>	<b>Persentase Perempuan di Lower House</b>
Rwanda	2024	63,8
Kuba	2023	55,7
Nikaragua	2021	53,9
Meksiko	2024	50,2
Andorra	2023	50
Namibia	2019	50
Uni Emirat Arab	2023	50
Kosta Rika	2022	49,1
Islandia	2021	47,6
Swedia	2022	46,7

# Meningkatkan keterwakilan perempuan: Manfaat bagi partai politik

**Insentif utama** bagi para pemimpin partai politik:

- ❑ Meningkatkan *citra dan reputasi* publik partai politik;
- ❑ Meningkatkan platform dan *agenda kebijakan* partai politik;
- ❑ Memperkuat *strategi elektoral* partai politik; dan
- ❑ Menekan *penurunan keanggotaan* partai.



# Strategi pemerintah: Evaluasi penerapan di berbagai negara

## Pemerintah menggiatkan strategi:

- ❑ **Kuota gender**: Di negara-negara dengan kuota parlemen yang diamanatkan, perempuan memegang rata-rata **26 persen** kursi parlemen, dibandingkan dengan **21 persen** di negara-negara tanpa kuota tersebut. Namun, potensi kuota sering kali tidak sepenuhnya terwujud, dengan target yang sering ditetapkan di bawah 50 persen dan mekanisme implementasi yang kurang atau lemah. Dari 94 negara yang menerapkan kuota, hanya seperlima yang telah menetapkan target 50 persen untuk representasi perempuan.

# Strategi pemerintah: Evaluasi penerapan di berbagai negara

## Pemerintah menggiatkan strategi:

- ❑ **Audit gender:** Kuota intra-partai menunjukkan peran penting partai politik dalam melibatkan perempuan dalam politik di berbagai tahapan. Audit gender di sebuah partai dapat mengungkap peluang untuk pertumbuhan dalam mengelola cabang, serta menunjukkan bagaimana keberagaman dan keterlibatan perempuan dapat membantu partai di arena politik. Pemerintah juga dapat menyiapkan berbagai dana untuk mendukung perempuan berpartisipasi dalam politik. Pengalaman: Nepal, Uganda, dan Kenya.

# Dinamika internal partai politik: Beberapa praktik teladan



**Insentif utama** bagi para pemimpin partai politik:

- ❑ Meningkatkan *citra dan reputasi* publik partai politik;
- ❑ Meningkatkan platform dan *agenda kebijakan* partai politik;
- ❑ Memperkuat *strategi elektoral* partai politik; dan
- ❑ Menekan *penurunan keanggotaan* partai.



# Dinamika internal partai politik: Beberapa praktik teladan

## Swedia: Kuota Partai Sukarela

Di Swedia, partai politik telah secara sukarela mengadopsi kuota gender untuk memastikan representasi yang seimbang.

Partai Sosial Demokrat, misalnya, menggunakan "sistem ritsleting" di mana kandidat laki-laki dan perempuan bergantian dalam daftar partai.

Hal ini mengakibatkan perempuan memegang sekitar 47% kursi parlemen.

# Dinamika internal partai politik: Beberapa praktik teladan

## Meksiko: Kuota Gender di Undang-undang

Meksiko telah menerapkan kuota gender yang sah yang mengharuskan 50% kandidat untuk pemilihan legislatif adalah perempuan.

Kebijakan ini telah meningkatkan representasi perempuan secara signifikan, dengan perempuan kini memegang hampir 50% kursi di majelis rendah dan tinggi parlemen.

# Dinamika internal partai politik: Beberapa praktik teladan

## Rwanda: Kuota Gender Konstitusional

Konstitusi Rwanda mengamanatkan agar setidaknya 30% kursi parlemen diperuntukkan bagi perempuan.

Kebijakan ini telah menyebabkan perempuan menduduki lebih dari 60% kursi di majelis rendah parlemen.

# Dinamika internal partai politik: Beberapa praktik teladan

## Selandia Baru: Sasaran Kesetaraan Gender

Selandia Baru telah menetapkan sasaran kesetaraan gender (gender parity goals) yang ambisius untuk representasi politik.

Negara ini telah mengalami peningkatan yang stabil dalam jumlah perempuan di parlemen, dengan perempuan saat ini menduduki sekitar 48% kursi.

Kemajuan ini dikaitkan dengan kebijakan partai dan komitmen masyarakat yang kuat terhadap kesetaraan gender.

# Dinamika internal partai politik: Beberapa praktik teladan

## Timor-Leste: Kuota Pemilihan

Timor-Leste mengamanatkan bahwa satu dari setiap tiga kandidat dalam daftar pemilihan haruslah seorang perempuan.

Sistem kuota ini telah menyebabkan perempuan menduduki 38,5% kursi parlemen, salah satu tingkat tertinggi di kawasan Asia-Pasifik.

Pemilu legislatif di Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase anggota Dewan Perwakilan Rakyat (**DPR**) dan Dewan Perwakilan Daerah (**DPD**) yang **bukan petahana dan bukan anggota keluarga pemimpin politik**, masing-masing hanya **1,7 dan 9,5 persen** (Priambada, 2024).

Warburton dkk. (2021) menemukan keselarasan yang kuat antara pendapat legislator dan konstituen kelas atas dan **keselarasan yang buruk dengan konstituen kelas bawah** pada hal-hal yang terkait dengan distribusi ekonomi.